

PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTEREN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KULON PROGO

IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM IN ACHIEVING ACCOUNTABILITY IN THE OFFICE OF INVESTMENT AND INTEGRATED SERVICER OF KULON PROGO

ANDIANSYAH

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UAD Yogyakarta
Jl. Kapas 9, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta 55166
Email: andiansya23@gmail.co

Abstrak

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kulon Progo. Dengan permasalahan bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dilakukan dengan metode pendengkatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumen pribadi/ yang terkait teknik analisisnya melalui Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Menarik Kesimpulan. Akhirnya ditemukan hasil Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di DPMPT Kabupaten Kulon Progo sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dalam penilaian dari unsur-unsur yang diaplikasikan DPMPT Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Pelaksanaan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan yang terakhir Pemantauan. Dari sisi lingkungan pengendalian di DPMPT Kabupaten Kulon Progo, beberapa aspek sudah berjalan dengan baik seperti penegakkan integritas terhadap pegawai. Di bidang penilaian resiko dilakukan sistem pengawasan data dan informasi dilakukan rencana kerja dan anggaran dengan hasilnya proses penyusunan dokumen, dan Kegiatan Pengendalian di DPMPT Kabupaten Kulon Progo sudah berjalan dengan baik. Serta penerapan informasi dan komunikasi di DPMPT Kabupaten Kulon Progo sudah baik. Hal ini dikarenakan adanya website milik DPMPT Kabupaten Kulon Progo yang memuat berbagai informasi berhubungan dengan DPMPT Kabupaten Kulon Progo. Dan begitu pula adanya keterbukaan informasi mempermudah pelaksanaan pemantauan. Setelah dilaksanakan penantauan dan dilakukan evaluasi secara terpisah per bidang dan per unsur SPIP sehingga dapat ditemukan solusi dalam suatu permasalahan. Pelaksanaan pemantauan sudah berjalan dengan baik.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas

Abstract

Implementation of the Government Internal Control System in Achieving Accountability in the Office of Investment and Integrated Servicer of Kulon Progo. With the problem of how the implementation of the government internal control system in increasing accountability in the Office of Investment and Integrated Servicer Kulon Progo Regency. This research by using a descriptive descriptive approach through interviews, field notes, and personal documents/

related analysis techniques through data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. Finally found the results of the Implementation of the Government Internal Control System in DPMPT Kulon Progo Regency has been going well. This is evidenced in the assessment of the elements applied by the Kulon Progo Regency DPMPT in the implementation of the Government Internal Control System, namely Control Environment, Risk Assessment, Implementation of Control, Information and Communication, and finally Monitoring. In terms of the control environment in the DPMPT Kulon Progo Regency, several aspects have gone well such as upholding the integrity of employees. In the field of risk assessment, a data and information monitoring system is carried out with a work plan and budget with the results of the document preparation process, and the Control Activities at DPMPT Kulon Progo Regency have been running well. And the application of information and communication in DPMPT Kulon Progo Regency is good. This is because there is a website owned by DPMPT Kulon Progo Regency which contains various information relating to DPMPT Kulon Progo Regency. And so is the openness of information to facilitate the implementation of monitoring. After monitoring and evaluation are carried out separately per sector and per SPIP element so that solutions can be found in a problem. The monitoring has run well.

Keywords: Government Internal Control System, Accountability

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang terjadi dalam perubahan atau perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatkan lembaga dan akuntabilitas publik, baik di daerah maupun pusat seperti halnya dalam menerapkan Good Governance di Indonesia merupakan tujuan utama pemerintah (Prasetyia, F: 2013). Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik (seperti: pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga Negara). Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi terhadap publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2002: 20). Selain dari pada itu, sistem pengendalian intern pada pemerintah juga sangat diperlukan guna mendapatkan kinerja aparat pemerintah yang baik. Sesuai mandat PP No. 60 Tahun 2008. Yang dimana sistem pengendalian intern ini menentukan kebijakan dan prosedur yang

dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak pada perusahaan yang telah mencapai tujuan dan sasarannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, Bupati Kulon Progo telah menetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, fungsi dan tugas serta tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, yang berupa 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu. Permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan SPIP terletak pada unsur-unsur dalam SPIP yang belum terlaksana sepenuhnya oleh instansi pemerintahan yang menerapkan SPIP. Begitu pula di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan salah satu badan yang telah menerapkan SPIP di Kabupaten Kulon Progo. ada permasalahan seperti penyerapan anggaran yang tidak sesuai target dan menyimpang dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Selain itu disistem perencanaan permasalahan kemampuan pegawai DPMPT Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan perencanaan dimana pegawai belum mampu menerapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dari DPMPT Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan latar belakang diatas, akhirnya peneliti merasa tertarik untuk menganalisis permasalahan mengenai pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kulon Progo.

B. Identifikasi Dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat di identifikasikan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Masih ada pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo yang tidak paham sistem akuntabilitas yang ada.
2. Keterbatasan kapabilitas SDM di tingkat dasar sehingga banyak informasi yang tidak terserap ke atas.
3. Belum terintegrasinya sistem plaporan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan baik.
4. SPIP yang berjalan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo belum terlihat dan dirasa kebermanfaatannya dalam meningkatkan aktabilitas.
5. Penyerapan anggaran yang tidak sesuai target dan menyimpang dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD).

Berdasarkan identifikasi diatas, maka yang dapat dirumuskan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung SPIP di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan dalam penelitian ini adalah terkait proses pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pelaksanaan sistem pengendalian pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
2. Mengetahui faktor yang menjadi penghambat dan pendukung SPIP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Dalam pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menyatakan:

1. Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

2. Pengendalian Intern

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa: "Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan Mulyadi tujuan pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan: 1. Keandalan informasi keuangan, 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan 3. Efektivitas dan efisiensi operasi, (2002:180).

3. Akuntabilitas

Haris (2007: 349) menyatakan bahwa, akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial dan program. Selanjutnya menurut Adisasmita (2011:30) akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fandi Wijaya (2017) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Unsur-unsur SPIP terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan data primer dengan cara menyebar kuesioner ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/DPKAD) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Reynaldi Riantiarno dan Nur Aztina (2011) dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terdiri dari pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundangan, Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan survey. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Sugiyono (2015:9) yang menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah yang pada hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan KM.1, Area Sawah, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55651.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 30 April 2019 sampai dengan 19 Agustus 2019.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

- a. Bapak Agung Kurniawan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
 - b. Ibu Rubiah sebagai Kepala subbagian kepegawaian Dinas Penanaman Modal kabupaten Kulon Progo.
 - c. Bapak Restu Dewandaru sebagai Kepala seksi Pelayanan kabupaten Kulon Progo.
 - d. Bapak Cahyono sebagai Kepala bidang Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
 - e. Ibu Siti Isnaini sebagai Kepala Subbagian keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
2. Data Sekunder

Data yang secara tidak langsung diperoleh oleh peneliti guna mendukung data yang sudah ada sehingga lebih lengkap adalah tergolong data sekunder. Yaitu : dokumentasi institusi, jurnal, makalah, buku, dan penelitian terdahulu.

D. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2015: 305) instrumen adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan data, mengambil data dan mengumpulkan data baik secara subjek maupun objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Bisa disebut sebagai *human instrument*, atau peneliti sendiri.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pemeriksaan Keabsahan Data

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi
4. Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Moleong (2011:173) kriteria keabsahan data ada empat macam, yaitu: kredibilitas (derajat kepercayaan), keteralihan kebergantungan, dan kepastian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahan data.

F. Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan diawali dengan melakukan pengamatan tempat penelitian. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan pihak terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di DPMPT Kabupaten Kulon Progo.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari laporan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

3. Penyajian Data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum tempat penelitian

a. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo.

Salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah adalah Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Type B yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu. Untuk menjalankan peran dan fungsinya sebagai penyelenggara

urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, maka diterbitkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu. Kemudian pemerintah Republik Indonesia menerbitkan peraturan tentang perangkat Daerah Nomor 18 Tahun 2016 maka dari itu pemerintah Kulon Progo menerbitkan peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo menerbitkan peraturan Nomor 49 Tahun 2016 sebagai petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (DPMPT).

b. Visi dan Misi

1) Visi

Terwujudnya penanaman modal yang berdaya saing dan berwawasan global; serta pelayanan perizinan yang prima.

2) Misi

a) Mewujudkan peningkatan daya saing daerah.

b) Mewujudkan pelayanan prima perizinan

c. Motto dan Maklumat

1) Motto :

Melayani dengan hati menuju yang terbaik.

2) Maklumat Pelayanan:

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak. menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

d. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten

Kulon Progo terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat Dinas terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 3) Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 - a) Seksi Kerja Sama dan Promosi; dan
 - b) Seksi Fasilitasi dan Pengembangan.
- 4) Bidang Pelayanan dan Pengaduan terdiri dari :
 - a) Seksi Perizinan;
 - b) Seksi Survei; dan
 - c) Seksi Pengaduan dan Advokasi.
- 5) Bidang Pengawasan Data dan Informasi, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengawasan; dan
 - b) Seksi Data dan Informasi.

2. Diskripsi Data penelitian

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdapat 5 unsur yang dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Kelima unsur tersebut antara lain lingkungan pengendalian: penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; dan pemantauan pengendalian intern. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dinas dari beberapa SKPD di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang memiliki tugas untuk melakukan pelayanan dalam penanaman modal dan perizinan secara terpadu.

a. Lingkungan Pengendalian

Pada pasal 4 PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- 8) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

UU PP Nomor 60 Tahun 2008, pasal 13, dicantumkan bahwa penilaian risiko adalah kegiatan yang dilakukan dan diupayakan oleh pemerintah untuk memantau keadaan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pada pencapaian tujuan dan sasaran output instansi pemerintah.

Di DPMPT Kabupaten Kulon Progo terlihat banyak beberapa kendala yang mengakibatkan sistem pemerintahan mandek yang cenderung sangat berpengaruh dan beresiko besar terhadap pelaksanaan dan proses pelayanan. Sehingga yang menjadi tujuan besar dari DPMPT kabupaten Kulon Progo adalah fokus pada program pelayanan investasi, pengawasan data informasi dan administrasi perijinan.

Ungkapan dan pernyataan ini disampaikan oleh Drs.Suwarna,M.si selaku kepala sekretaris dinas DPMPT mengatakan;

“Bahwa program pengendalian dan penilaian resiko dilaksanakan setiap satu kali setahun diakhir program pelayanan dengan tahap evaluasi. Tujuannya adalah untuk melihat resiko dan proses kelancaran yang ada dalam arti apakah berjalan dengan lancar, sesuai target dan tepat sasaran atau tidak. Tentu semua itu harus dipertimbangkan dengan secara struktural untuk dilaporkan kepada kepala dinas DPMPT sebagai bentuk pengendalian laporan. Seluruh struktural selaku PPTK dan selaku penanggungjawab kegiatan memberikan laporan kepada Kepala Dinas. Tetapi setiap program perencanaan didasarkan pada manajemen resiko disetiap bidang pelayanan.”

“Pernyataan lain juga dikatakn ada dua pokok yang menjadi ketentuan dasar dalam setiap program DPMPT dibidang pelayanan dan perencanaan.”

1. Pelayanan perizinan, dan

2. Pengaduan

Dalam SPIP, penilaian resiko dilaksanakan oleh pimpinan pemerintahan yang dimuatkan untuk mengetaskan pernyataan dan gambaran yang selektif, aktif, terukur, dan spesifik serta realistis agar dapat ditempuh dan dicapai terhadap komunikasi oleh seluruh pegawai di dinas DPMPT kabupaten Kulon Progo. Penilaian resiko ini diawali dengan penetapan;

1. Identifikasi tujuan dibidang pelayanan investasi dan
2. Penggambaran tahap proses pencapaian tujuan.

c. Kegiatan Pengendalian

Dalam undang-undang PP No.60 tahun 2008 tentang kegiatan pengendalian intern pemerintah yang berdasarkan hasil dari pertimbangan penilaian resiko pemerintah diupayakan atas respon dan tanggung jawab untuk menarik sistem informasi yang tepat dan efektif dalam membangun kegiatan pengendalian.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Rubiyah selaku sebagai kepala bagian subbidang umum dan kepegawaian di dinas DPMPT kabupaten Kulon Progo (hasil interview pada tanggal 24 bulan 07), menyatakan:

“bahwa pelaksanaan atas kinerja pegawai diupayakan pemantauan satu kali seminggu selama proses kinerja pegawai berlangsung dengan tujuan standar output, kinerja pencapaian, dan tepat sasaran. Upaya dan hasil orientasi kepegawaian ini difungsikan oleh kepala DPMPT kabupaten Kulon Progo untuk diperlihatkan kepada pemerintah daerah dengan sistem pemeriksaan dan pemanyauan kembali.”

d. Informasi dan Komunikasi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Bab V Pasal 41 Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Dalam melaksanakan komunikasi yang baik Instansi pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai sumber dan komunikasi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Data dan Informasi DPMPT Kabupaten Kulon Progo dalam wawancara pada tanggal 24 Juli 2019, Beliau mengatakan.

"Kalau internal itu secara kedinasan bisa melalui telepon ekstension, rapat-rapat koordinasi, kalau untuk komunikasi antar pegawai kita biasa melakukan sms, WA, atau telepon tetapi apabila pegawai melakukan komunikasi dengan atasan harus menggunakan surat dinas. Lalu untuk komunikasi diluar dinas biasa dengan menggunakan E-mail, surat dinas. Karena adanya visi misi pak Bupati untuk menciptakan Smart City di Kabupaten Kulon Progo sehingga dapat mengurangi penggunaan kertas di pemerintahan kabupaten Kulon Progo"

e. Pemantauan

Pemantauan SPIP yang dilakukan DPMPT Kabupaten Kulon Progo dilakukan menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman mereka dalam melakukan pemantauan SPIP. Apabila ada penyelewengan terhadap SOP yang berlaku akan segera dideteksi dan memberikan punishment bagi pegawai yang menyalahi SOP yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam wawancara pada tanggal 24 Juli 2019. Beliau mengatakan.

"Kita tetap menggunakan SOP sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kemudian untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai kita berpedoman pada kode etik pegawai dan UU disiplin ASN, Walaupun nanti adanya penyelewengan terhadap SOP akan tetap mudah terdeteksi."

f. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan SPIP di DPMPT

Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengawasan maka peneliti mengambil satu kesimpulan bahwa faktor pendukung yang ada dalam pelaksanaan SPIP di DPMPT Kabupaten Kulon Progo, yaitu:

- 1) Adanya dorongan dari pihak masyarakat yang memberikan kritikan dan saran di DPMPT melalui website yang disediakan. Tujuannya adalah untuk memangkas opini-opini masyarakat yang dijadikan sebagai bentuk pelaksanaan tugas khusus yang berupa pelayanan.
- 2) Adanya sistem informasi secara online yang menjadi salah satu faktor pendorong dan pendukung yang sangat efektif.

B. Pembahasan

Sebagai salah satu instrumen pemerintahan, DPMPT Kabupaten Kulon Progo mempunyai tanggung jawab yang besar dalam penyediaan jasa pelayanan bagi masyarakat yang ingin melakukan penanaman modal dan perizinan secara terpadu. DPMPT permohonan untuk membuat perizinan secara terpadu DPMPT Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu dinas yang sudah melaksanakan SPIP guna meningkatkan akuntabilitas.

1. Lingkungan Pengendalian

Dalam Kumaat (2011:16), Lingkungan pengendalian melingkupi karyawan terhadap pentingnya sikap manajemen dan para pengendalian intern dalam suatu organisasi. Lingkungan dibentuk oleh seluruh unsur di sebuah organisasi termasuk SDM. Pondasi bagi sebuah organisasi yang baik adalah lingkungan internal yang baik pula.

2. Penilaian Risiko

Menurut Peltier (2001:21) risiko merupakan kemungkinan terjadinya beberapa ancaman yang mudah menyerang. Penilaian risiko merupakan unsur kedua yang termasuk dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hal ini dikarenakan risiko merupakan hal yang ada dalam setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh organisasi. Dalam PP No 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa penilaian risiko dilakukan karena dalam setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat, kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada di dalamnya. Penilaian risiko dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh Bidang Perencanaan dan Evaluasi. DPMPT Kabupaten Kulon Progo melakukan penilaian risiko pada awal periode. Waktu ini dipilih agar DPMPT Kabupaten Kulon Progo bisa lebih awal dalam menentukan strategi.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan unsur ketiga sebagai tindak lanjut dan penilaian risiko. Menurut SPIP, kegiatan Pengendalian internal pemerintah dilakukan dengan review kinerja instansi pemerintah pembinaan sumber daya manusia pengendalian pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik aset, penetapan dan review indikator ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi transaksi dan kejadian penting, pencatatan akurat dan tepat waktu, pembatasan akses sumber daya, akuntabilitas sumber daya, dan dokumentasi sistem pengendalian intern pemerintah.

4. Pembentukan SOP

Sesuai dengan keputusan kepala dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo Nomor: 010 Tahun 2017 tentang standar operasional prosedur (sop) pelayanan perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu kabupaten kulon bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan SKPD masing-masing dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di masyarakat.

5. Informasi dan Komunikasi

DPMPT Kabupaten Kulon Progo memiliki sistem informasi online yang digunakan untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DPMPT Kabupaten Kulon Progo dan bisa diakses dengan mudah oleh semua orang. Informasi yang diberikan biasanya hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan penanaman modal dan pelayanan permohonan perizinan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki telepon ekstension yang menghubungkan seluruh dinas di Kabupaten kulon progo sehingga memudahkan dalam melakukan komunikasi baik secara internal maupun eksternal.

6. Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan di DPMPT Kabupaten Kulon Progo dilakukan oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh Bidang Umum dan Kepegawaian. Adanya keterbukaan informasi memudahkan proses pemantauan. Pemantauan dilakukan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

Pimpinan juga melakukan evaluasi terpisah, yaitu evaluasi per bidang dan per unsur SPIP agar pemimpin dapat menemukan masalah dalam sistem itu sendiri. Sampai saat ini, tidak ada masalah yang berarti dalam pelaksanaan pemantauan SPIP.

7. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penyelenggaraan SPIP

8. Peran SPIP dalam Mewujudkan Akuntabilitas

9. Salah satu tujuan SPIP adalah melakukan evaluasi program kebijakan dan kinerja pegawai agar terwujudnya akuntabilitas DPMPT Kabupaten Kulon Progo terhadap pemerintah pusat maupun daerah, juga kepada masyarakat. Dengan adanya SPIP, maka terdapat pengawasan dan pengendalian yang tepat terhadap kinerja dan program yang dilaksanakan oleh DPMPT Kabupaten Kulon Progo. Selain akuntabilitas, SPIP juga menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi sendiri merupakan proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga yang membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten kulon progo (DPMPT) merupakan salah satu dinas di Kabupaten Kulon Progo yang sudah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di DPMPT Kabupaten Kulon Progo berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam Sistem Pengendalian Intem Pemerintah. yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Pelaksanaan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan yang terakhir Pemantauan. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di DPMPT dinas di Kabupatenm Kulon Progo yang sudah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hal ini dibuktikan dalam penilaian dari unsur-unsur yang diaplikasikan DPMPT Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Risiko
- c. Kegiatan Pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi
- e. Pemantauan di DPMPT Kabupaten kulon progo dilakukan oleh Kepala Dinas yang dibantu Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dan pengawasan maka peneliti mengambil satu kesimpulan bahwa

a. faktor pendukung yang ada dalam pelaksanaan SPIP di DPMPT Kabupaten Kulon Progo yaitu:

- 1). Adanya dorongan dari pihak masyarakat yang memerikan kritikan dan saran di DPMPT melalui website yang tersediakan. Tujuannya adalah untuk memangkas opini-opini masyarakat yang jadikan sebagai bentuk pelaksanaan tugas khusus yang berupa pelayanan.
- 2). Adanya sistem informasi secara online menjadi salah satu faktor pendorong dan pendukung yang sangat efektif. Sistem informasi ini dapat diakses di DPMPT kapan saja dan dimana saja.

b. Faktor Penghambat

Dari hasil pengamatan dan wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa faktor penghambat pelaksanaan SPIP di DPMPT Kabupaten Kulon Progo yaitu pembentukan SOP untuk mengukur kapasitas kemampuan dan keterampilan kinerja kepegawaian yang bersifat sistematis, dan terukur. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian DPMPT Kabupaten Kulon Progo dalam wawancara pada 24 Juli 2019.

Selain daripada standar pelayanan, pembagian tugas, dan time skedjul juga mengatakan bahwa: Kurangnya komitmen sumber daya manusia yang menjadi penghambat pelaksanaan SPIP di DPMPT Kabupaten Kulon Progo dan Kurangnya pemahaman pegawai terhadap esensi dari SPIP sehingga tidak memunculkan kesadaran pegawai untuk melaksanakan dengan sebenar-benarnya.

B. Dalam penelitian yang telah dilakukan, ditentukan bahwa dalam proses pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di DPMPT Kabupaten Kulon Progo terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi akuntabilitas. Bagi pemegang kebijakan, dapat memberikan informasi mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi akuntabilitas, sehingga dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan akuntabilitas dengan cara meningkatkan dan memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah.

Daftar Pustaka

Abdul Halim, Dkk. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu. Makassar.

Bungin. Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Coso, 2013, *Internal Control - Integrated Framework : Executive Summary*, Durham, North Carolina, May 2013

Ernie Tisnawati, Kurniawan Saefullah, 2005 “*Pengantar Mananjemen*”, Murai Kencana, Jakarta.

Ferry Prasetyia, 2013, *Teori Sektor Publik*. <http://ferryfebub.lecture.ub.ac.id>

Handoko, T.Hani, 2003, *Manajemen Personalialia Dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Bpfe-Yogyakarta.

Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*. Jakarta: Lipi Press

Kumaat, Valarey G. (2011). *Internal Audit*. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Mahsun, Mohamad (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama*. Yogyakarta : Penerbit Bpfe-Yogyakarta.

Mardiasmo (2002).*Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta:Yogyakarta.

Maringan Masry, 2004. *Dasar-Dasar Dan Administrasi Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Miles, M.B & Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Oleh Tjetjep Rohendi Rohadi.
Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992

Miles, Matew B Dan A. Michael Huberman. (2007), *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode- Meiode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Mulyadi, 2002, *Auditing*, Edisi Keenam, Cetakan Pertama , Jakarta: Salemba Empat.

(2002). *Akutansi Sektor Publik*, Perpustakaan Nasional: Andi Yogyakarta. Hlm
17-18 Cetakan 2009.

Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Pt Remaja
Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 *Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 *Tentang System Pengendalian Internal*.

P. Loina Lalolo Krina. 2003. *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabiitas, Transparansi
Dan Partisipasi*. Jakarta.

Reza Putra Kusuma Dan F. Winarni. (2017). *Intern Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Perizinan Implementation Of Goverment Internal Control System To*. 79–93.

Siagian, Sondang., P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama)*. Jakarta:
Binapura Aksara.

Sofyan 2004. *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep Dan Strategi*. Pt. Jakarta:
Grafindopersada.

Soekidjan. 2009. *Manjaemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: BumiAksara

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Penerbit Cv. Alfabeta: Bandung.

Umi Narimawati. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Agung Media